

ANALISIS IMPLEMENTASI PENGAKUAN PENDAPATAN DAN BIAYA BERDASARKAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN 72 PADA PERUSAHAAN KONSTRUKSI STUDI KASUS PADA PT X

Preska Kemuel Feliks Ratuanik¹, Dwi Anggarani², Khojanah Hasan³

^{1,2,3}Universitas Widyagama Malang

Jl. Borobudur No.35, Mojolangu, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur

Email Correspondence: feliskemuell4@gmail.com

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Received: November 28, 2023

Revised: January 9, 2024

Accepted: January 13, 2024

Kata Kunci: PSAK 72, Pengakuan Pendapatan, Pengakuan Biaya

Keywords: PSAK 72, Revenue Recognition, Cost Recognition.

ABSTRAK

Pendapatan dan biaya merupakan komponen penting sebagai instrumen pembentuk laba laba yang harus diakui secara akurat dan andal. Keakuratan dari pengakuan pendapatan tidak terlepas dari regulasi dan aturan yang mengatur. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus pada PT yang menerapkan PSAK 72. Tujuannya adalah untuk memahami bagaimana entitas dapat mengidentifikasi, mengukur, dan mengakui pendapatan dalam proyek-proyek yang melibatkan kontrak dengan pelanggan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi PSAK 72 pada PT X khusus nya pada proyek yang diteliti perlu dilakukan penyesuaian dalam mengakui dan mengukur pendapatan dari kontrak kerjasama proyek. Selain itu, PT X dalam mengakui pendapatan sebaiknya menggunakan metode pengakuan pendapatan yang paling sesuai dengan kontrak yang dikerjakan, agar pendapatan dan biaya yang diakui dapat diukur dengan akurat.

ABSTRACT

Revenues and expenses are important components as profit-forming instruments that must be recognized accurately and reliably. The accuracy of revenue recognition is inseparable from the regulations and rules that govern it. This study uses a qualitative approach with case studies at PTs that apply PSAK 72. The aim is to understand how entities can identify, measure, and recognize revenue in projects that involve contracts with customers. The results showed that the implementation of PSAK 72 at PT X, especially in the project under study, needs to be adjusted in recognizing and booking revenue from project cooperation contracts. In addition, PT X in recognizing revenue should use the revenue recognition method that is most appropriate for the contract being worked on, so that the revenue and costs recognized can be measured accurately.

PENDAHULUAN

Sebagai entitas atau organisasi yang berorientasi pada profit (laba), komponen pendapatan dan biaya merupakan hal yang urgent dalam menilai aktivitas operasional dari sebuah perusahaan. Salah satu indikator penting dalam peningkatan laba adalah komponen pendapatan. Pendapatan

yang diakui oleh entitas harus diukur secara andal dan akurat. Selain pos pendapatan instrumen pembentuk laba lainnya yakni biaya juga harus dinilai secara wajar dan diperhitungkan dengan akurat agar besaran dari komponen biaya tidak secara signifikan mempengaruhi pendapatan netto yang diakui. Keterkaitan ke-dua komponen ini dapat menjelaskan bahwa pendapatan dan biaya memiliki hubungan yang saling mempengaruhi satu sama lain. Hubungan ini mencerminkan pengaruh satu terhadap yang lain, serta bagaimana perubahan dalam satu komponen dapat mempengaruhi komponen lainnya.

Berdasarkan pedoman dalam menjalankan praktek akuntansi di Indonesia Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) terkhusus nya PSAK 72 sebagai standar (*principle base*) yang mengatur tentang pengakuan pendapatan atas kontrak dengan pelanggan memuat prinsip-prinsip yang harus dijalankan perusahaan dalam mengakui pendapatan yang bersumber dari aktivitas utama perusahaan itu sendiri. Tujuan PSAK 72 adalah untuk menetapkan prinsip-prinsip yang digunakan entitas untuk melaporkan informasi yang berguna kepada pengguna laporan keuangan tentang sifat, jumlah, waktu, dan ketidakpastian pendapatan dan arus kas dari kontrak dengan pelanggan. Penghasilan (*income*) dalam PSAK 72 dikonversikan sebagai penghasilan yang diterima selama aktivitas normal perusahaan. Untuk dapat menentukan pengakuan pendapatan, pernyataan ini mensyaratkan entitas untuk melakukan analisa transaksi berdasarkan kontrak terlebih dahulu, yaitu; Mengidentifikasi Kontrak dengan pelanggan, Mengidentifikasi Kewajiban pelaksanaan, Menentukan Harga Transaksi, Mengalokasikan harga transaksi terhadap kewajiban pelaksanaan, Mengakui pendapatan ketika entitas telah selesai melaksanakan kewajiban pelaksanaan.

LANDASAN TEORI

Teori Normatif

Teori Normatif merupakan teori yang menjelaskan bagaimana mempraktekan proses akuntansi sesuai dengan standar dan pedoman. Teori normatif merupakan teori dasar yang melatar belakangi lahirnya pedoman yang dirumuskan oleh lembaga wewenang dalam mencetuskan standar akuntansi.

Teori Akuntansi

Menurut (Kieso, Weygandt, & Kimmel, 2019) mendefenisikan bahwa akuntansi merupakan proses atau aktivitas pengidentifikasian, pencatatan, dan mengkomunikasikan kejadian-kejadian ekonomi dalam sebuah organisasi kepada pengguna informasi.

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) merupakan seperangkat aturan dan prinsip yang dijadikan sebagai acuan (pedoman) oleh perusahaan atau entitas serta organisasi ataupun badan dalam menyusun laporan keuangan. Standar Akuntansi Keuangan adalah suatu koridor serta regulasi yang mengacu pada kerangka konseptual sebagai pedoman dalam melakukan proses akuntansi agar tercipta harmonisai dalam menginformasikan informasi keuangan (financial statement)

Pendapatan

Menurut (Kieso, Weygandt, & Kimmel, Pengantar Akuntansi 1 Berbasis IFRS, 2019) pendapatan adalah arus kas (ekonomi) yang akan meningkatkan kekayaan entitas, atas aktivitas normal operasi sebuah entitas atau perusahaan. Menurut PSAK 72, pendapatan didefinisikan sebagai arus masuk atau peningkatan manfaat ekonomi yang timbul dari kegiatan operasional perusahaan selama periode akuntansi yang bersangkutan.

Biaya

Menurut (Mulyadi, Akuntansi Biaya, 2018) menerangkan bahwa biaya merupakan pengorbanan pada sumber ekonomi terukur menggunakan satuan uang yang akan atau telah terjadi dalam mencapai tujuan tertentu.

Hansen dan Mowen (2009) mendefinisikan biaya sebagai pengorbanan yang terukur dalam suatu mata uang atau barang, yang diperlukan untuk memperoleh barang atau jasa.

Pengakuan Pendapatan

Hansen dan Mowen (2009) mendefinisikan biaya sebagai pengorbanan yang terukur dalam suatu mata uang atau barang, yang diperlukan untuk memperoleh barang atau jasa.

Entitas mengakui pendapatan dari penjualan produk dan jasa pada saat penjualan atau pengalihan asset dengan memperhatikan beberapa hal berikut :

1. Entitas mengakui pendapatan dari jasa yang diberikan ketika jasa diberikan dan dapat ditagih
2. Perusahaan mengakui pendapatan dari pemberian izin kepada pihak lain untuk menggunakan aset perusahaan, contohnya bunga, sewa, dll., dari waktu ke waktu atau jika pada saat aset sedang dimanfaatkan
3. Entitas mengakui pendapatan dari pelepasan aset selain produk yang biasanya dijual pada saat transaksi penjualan.

Dalam mengakui pendapatan terdapat dua metode pengakuan adalah sebagai berikut :

1. Metode pencapaian (*percentage of completion method*) pada metode ini entitas mengakui pendapatan berdasarkan kemajuan pekerjaan kontrak
2. Metode penyelesaian (*completed contract method*) pada metode ini entitas mengakui pendapatan hanya setelah kontrak selesai.

Pengakuan Biaya

Pengakuan biaya kontrak diakui sebagai aset hanya jika biaya tersebut memenuhi kriteria pengakuan biaya kontrak. Kriteria ini termasuk adanya kemungkinan bahwa biaya tersebut akan menghasilkan manfaat ekonomi masa depan dan biaya tersebut dapat diukur secara andal. Biaya yang dapat dikaitkan hanya biaya yang dapat langsung dikaitkan dengan pelaksanaan kontrak yang diakui. Biaya yang tidak dapat dikaitkan langsung dengan kontrak biasanya diakui sebagai beban saat terjadi.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan cara atau teknik ilmiah dalam mengumpulkan data, dan akan diproses secara tersstruktur agar dapat memberikan penjelasan yang lebih komprehensif terkait dengan tujuan penelitian. (Sugiyono, 2019). Pada penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif yang bersifat menggambarkan atau mendeskripsikan sesuatu yang terjadi pada objek penelitian (Sugiyono, 2019). Serta menggunakan pendekatan komparatif dalam membandingkan beberapa variabel berbeda yang termuat didalam objek penelitian.

Setting Penelitian

Setting penelitian pada penelitian ini adalah di *Head Office*, berlokasi pada Jln Hang Tuah Raya No 26, Kec Kebayoran Baru, Kota Adm Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta.

Teknik Pengumpulan Data

Menurut (Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&d, 2019) adalah tahapan atau langkah penting dalam proses penelitian, yang bertujuan untuk mendapatkan data. Ditinjau dari teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan tiga teknik yaitu ; observasi (pengamatan), *interview* (wawancara) dan dokumentasi.

Jenis dan Sumber Data

Menurut (Sugiyono, 2019) menjelaskan bahwa data dibedakan dalam dua jenis yaitu data *primer* dan juga data *sekunder*. Data *primer* merupakan data yang langsung diperoleh dari lapangan, sedangkan data *sekunder* adalah data yang diperoleh dari sumber lain. Berdasarkan sumbernya, data dibedakan atas dua sumber yaitu data internal dan data eksternal.

Teknik Analisis Data

Metode Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan analisis deskriptif dengan pendekatan studi kasus untuk memberikan gambaran atau penjelasan mengenai kesesuaian praktek akuntansi pengakuan pendapatan dan biaya, pada PT X dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK 72) . Adapun tahapan-tahapan analisis data dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi dokumen kontrak dengan pelanggan, berupa kontrak yang sudah selesai dikerjakan dengan tujuan untuk dianalisis,
2. Menganalisis praktek akuntansi pendapatan pada PT X dalam mengakui pendapatan dan biaya atas kontrak dengan pelanggan, melalui tahapan identifikasi penerapan prinsip pengakuan pendapatan berdasarkan PSAK No 72
3. Hasil indentifikasi kemudian dideskripsikan agar mendapatkan gambaran secara komprehensif mengenai penerapan pengakuan pendapatan pada PT X dengan prinsip pengakuan pendapatan berdasarkan PSAK No 72.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Pengakuan Pendapatan dan Biaya Pada PT X

PT X adalah perusahaan dengan spesialisasi pada bidang pelayanan jasa Teknik terkhususnya pada sektor transportasi, jalan dan jembatan serta bidang teknik sipil lainnya. Jenis Usaha yang dimiliki oleh PT X antara lain (1) Usaha Pekerjaan Konstruksi (2) Usaha Konsultansi

Konstruksi (3) Konstruksi Terintegritas. Berdasarkan Jenis usaha yang dimiliki, PT X berhasil memenangkan tender atas kontrak kerjasama pekerjaan Manajemen Konstruksi Green Building Gedung Utama Kejaksaan Agung Indonesia.

Tabel 1. Informas Kontrak

Informasi	Keterangan
Nama Proyek	Manajemen Konstruksi Green Building Gedung Utama Kejaksaan Agung Republik Indonesia
Nomor Kontrak	01.MK.GB/SP/PPK/C.3.5/Cum.5/7/2022
Periode Pekerjaan	3 Tahun dimulai Juni 2021 – 2023 Juni
Pemberi Kerja	Kejaksaan Agung Republik Indonesia
Nilai Kontrak	Rp 3.345.600.000 (<i>Include Tax</i>)
Rencana Anggaran Pelaksanaan Proyek	Rp 3.011.040.000

Sumber : PT X

Berdasarkan tabel 4.1 diatas dapat diketahui bahwa PT X memiliki kontrak konsultansi Manajemen Konstruksi dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia dengan nama proyek Manajemen Konstruksi Green Building Gedung Utama Kejaksaan Agung Republik Indonesia dengan nomor kontrak 01.MK.GB/SP/PPK/C.3.5/Cum.5/7/2022 dan periode kontrak selama 3 tahun dengan periode kontrak dimulai pada 2021 – 2023 . Nilai kontrak pada kontrak ini sebesar Rp 3.345.651.000 dimana nilai kontrak ini masih termasuk pajak.

Table 2. Informasi Tambahan Proyek

Tahun	Realisasi Biaya dibebankan	Taksiran biaya untuk menyelesaikan	Termin difakturkan	Penerimaan termin
2021	669.120.000	2.220.994.475	1.003.695.300	1.003.695.300
2022	1.321.512.000	943.922.652	1.003.695.300	1.003.695.300
2023	1.020.408.000	-	1.338.260.400	1.338.260.400
	3.011.040.000	3.011.040.000	3.345.651.000	3.345.6510.000

Sumber : PT X diolah peneliti 2023

Berdasarkan tabel 4.2 diatas maka PT X melakukan pencatatan jurnal sebagai berikut :

1. Penyajian jurnal tahun 2021

a) Pengeluaran Biaya

Pekerjaan dalam progres	Rp 669.120.000
Kas besar kantor pusat	Rp 669.120.000
b) Penagihan Termin	
Piutang Gedung / Prasarana Industri Lancar	Rp 1.003.695.300
Tagihan Bruto Gedung / Prasarana	Rp 1.003.695.300
c) Pembayaran Ternin	
PT Bank Mandiri	Rp 872..581.950
Biaya Pajak Pertambahan Nilai	Rp 99.465.300
Biaya Pajak PPh pasal 4 Ayat 2 Final	Rp 31. 648.050
Piutang Gedung / Prasarana Industri Lancar	Rp 1.003.695.300

2. Penyajian jurnal tahun 2022

a) Pengeluaran Biaya	
Pekerjaan dalam progres	Rp 1.321.512.000
Kas besar kantor pusat	Rp 1.321.512.000
b) Penagihan Termin	
Piutang Gedung / Prasarana Industri Lancar	Rp 1.003.695.300
Tagihan Bruto Gedung / Prasarana	Rp 1.003.695.300
c) Pembayaran Ternin	
PT Bank Mandiri	Rp 872..581.950
Biaya Pajak Pertambahan Nilai	Rp 99.465.300
Biaya Pajak PPh pasal 4 Ayat 2 Final	Rp 31. 648.050
Piutang Gedung / Prasarana Industri Lancar	Rp 1.003.695.300

3. Penyajian jurnal tahun 2022

a) Pengeluaran Biaya	
Pekerjaan dalam progres	Rp 1.020.408.000
Kas besar kantor pusat	Rp 669.120.000
b) Penagihan Termin	
Piutang Gedung / Prasarana Industri Lancar	Rp 1.003.695.300
Tagihan Bruto Gedung / Prasarana	Rp 1.003.695.300

c) Pembayaran Termin

PT Bank Mandiri	Rp 872..581.950
Biaya Pajak Pertambahan Nilai	Rp 99.465.300
Biaya Pajak PPh pasal 4 Ayat 2 Final	Rp 31. 648.050
Piutang Gedung / Prasarana Industri Lancar	Rp 1.003.695.300

4. Penyajian jurnal tahun 2023

a) Pengeluaran Biaya

Pekerjaan dalam progres	Rp 1.020.408.000
Kas besar kantor pusat	Rp 1.020.408.000

b) Penagihan Termin

Piutang Gedung / Prasarana Industri Lancar	Rp 1.338.260.400
Tagihan Bruto Gedung / Prasarana	Rp 1.338.260.400

c) Pembayaran Termin

PT Bank Mandiri	Rp 1.163.442.600
Biaya Pajak Pertambahan Nilai	Rp 132.620.000
Biaya Pajak PPh pasal 4 Ayat 2 Final	Rp 42.197.400
Piutang Gedung / Prasarana Industri Lancar	Rp 1.003.695.300

Berdasarkan tabel 4.2 diatas dan penyajian jurnal diatas maka PT X melakukan pengungkapan dalam laporan laba rugi dan laporan neraca adalah sebagai berikut :

Tabel 3. Laporan Laba Rugi Proyek Manajemen Konsultan Konstruksi

Laba Rugi	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
Pendapatan Pusat Gedung dan Prasana	Rp 872..581.950	Rp 1.745.163.900	Rp 3.345.651.000
Kas besar kantor pusat			(Rp 3.011.040.000)
Laba Bruto			Rp 334.611.000

Sumber : PT X diolah peneliti 2023

Tabel 4. Laporan Neraca Proyek Manajemen Konstruksi

Neraca	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
Aset			
Kas / Kas di Bank	Rp 872.581.950	Rp 1.745.163.900	Rp 2.908.606.500
Kas besar kantor pusat			(Rp3.011.040.000)
Total Aset			Rp 102.433.500
Kewajiban			
PPN Keluaran	Rp 99.465.300	Rp 198.930.600	Rp 331.551.000
PPH Pasal 4 Ayat 2 Final	Rp 31.648.050	Rp 63.296.100	Rp 105.493.500
Total Kewajiban	Rp 131.113.350	Rp 262.226.700	Rp 437.044.500
Modal			
Laba Rugi Periode Berjalan Sumber : PT X diolah Peneliti 2023			(Rp 334.611.000)
Total Kewajiban dan Modal			Rp 102.433.500

Berdasarkan tabel 4.4 dan 4.5 dalam mengungkapkan pendapatan dan biaya atas kontrak dengan pelanggan PT X memiliki Laba bruto yang diperoleh pada proyek ini adalah sebesar Rp 334.611.000 serta total aset, kewajiban, dan modal adalah sebesar Rp 102.433.500.

1. Analisis Kesesuaian Implementasi Pengakuan Pendapatan dan Biaya Berdasarkan PSAK 72 pada PT X

Mengidentifikasi Kontrak dengan Pelanggan

Sesuai dengan Standar PSAK 72 dalam mengidentifikasi kontrak dengan pelanggan PT X telah menerapkan beberapa hal berikut antara lain :

- Para Pihak dalam kontrak menyetujui kontrak baik secara tertulis, lisan maupun sesuai dengan praktik bisnis pada umumnya serta, bersama memiliki komitmen untuk melaksanakan kewajiban masing-masing pihak.
- PT X telah mengidentifikasi hak atas pengalihan jasa berupa pembayaran jasa manajemen konstruksi pada proyek Green Building Gedung Utama Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

- c) PT X telah mengidentifikasi jangka waktu pembayaran pada proyek Manajemen Konstruksi Grees Building Gedung Utama Kejaksaan Agung Republik Indonesia selama masa kontrak berlangsung yaitu 3 Tahun terhitung 2021 hingga 2023.
- d) Pada kontrak memiliki substansi komersial berupa (risiko, waktu serta arus kas masuk yang akibat dari kontrak) atas substansi komersial ini dapat mempengaruhi aktivitas operasi pihak penyedia jasa
- e) PT X berhak menagih imbalan atas haknya akibat dari penyelesaian pekerjaan jasa manajemen konstruksi pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

Adapun beberapa hal yang terdapat dalam syarat-syarat umum kontrak pada paket pekerjaan manajemen konstruksi gedung utama Kejaksaan Agung Republik ini yang diatur dalam PSAK 72 pada poin modifikasi kontrak adalah apabila terjadi perubahan dalam kontrak maka kontrak hanya dapat diubah melalui addendum kontrak dan dapat dilaksanakan perubahannya apabila disetujui oleh para pihak yang termuat didalam kontrak. Beberapa hal berikut meliputi : perubahan pekerjaan, perubahan harga kontrak, perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan, perubahan personel inti dan perubahan kontrak yang disebabkan masalah administrasi.

Mengidentifikasi Kewajiban Pelaksanaan

Berdasarkan kontrak, kewajiban PT X sebagai pelaksana pekerjaan adalah memberikan jasa manajemen konstruksi sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan berdasarkan kontrak. Sesuai dengan PSAK 72 terdapat dua jenis pelaksanaan dalam menyelesaikan kewajiban yaitu kewajiban pelaksanaan yang diselesaikan sepanjang waktu dan kewajiban pelaksanaan yang diselesaikan pada waktu tertentu. Pada PT X sesuai dengan kebijakan akuntansi perusahaan terdapat kontrak jangka panjang dan jangka pendek, untuk kontrak manajemen konstruksi pada penelitian ini termasuk kontrak jangka panjang karena lebih dari satu tahun. Kontrak jangka panjang ini kemudian diselesaikan dengan jenis pelaksanaan yang dilaksanakan sepanjang waktu karena memenuhi salah dua kriteria pelaksanaan kewajiban sepanjang waktu sesuai dengan paragraf 35 pada PSAK 72 yaitu poin (a) dan poin (b). Pada poin (a) menjelaskan pelanggan secara simultan menerima dan mengonsumsi manfaat yang disediakan dari pelaksanaan entitas selama entitas melaksanakan kewajiban pelaksanaan, sedangkan pada poin (b) berisikan

pelaksanaan entitas menimbulkan atau meningkatkan aset (jasa manajemen konstruksi) yang dikendalikan selama aset tersebut ditimbulkan atau ditingkatkan.

Pengakuan Biaya Kontrak

Dalam melaksanakan pekerjaan PT X mengeluarkan biaya-biaya yang dikorbankan guna memperoleh pendapatan. Berdasarkan PSAK 72 paragraf 91 menjelaskan bahwa entitas mengakui biaya inkremental atas perolehan kontrak dengan pelanggan sebagai aset jika entitas memperkirakan untuk memulihkan biaya tersebut. Pada PT X biaya inkremental atas perolehan proyek diperoleh langsung dari kontrak itu sendiri maupun menggunakan pembiayaan dari proyek lain dalam memenuhi pelaksanaan pekerjaan. Namun pada praktek umum bisnis entitas, biaya inkremental yang timbul bersumber langsung dari kontrak itu. Pada proyek ini biaya inkremental serta biaya pemenuhan kontrak tidak berasal dari langsung dari kontrak hal ini dikarenakan pada kontrak ini menggunakan metode kontrak selesai, diaman biaya baru akan dipulihkan pada saat kontrak selesai atau ketika pekerjaan telah selesai dan sudah diterima oleh pemberi kerja.

Menentukan Harga Transaksi

Keterhubungan antara pendapatan dan biaya merupakan dua komponen penting yang harus diukur secara akurat. Dalam mengukur pengerbonan (biaya) yang harus dikorbankan untuk memperoleh pendapatan PT X seharusnya memperhatikan komponen biaya yang dikeluarkan. Perusahaan dalam melakukan perencanaan anggaran pelaksanaan proyek bisa melakukan penyesuaian terhadap biaya operasional dan gaji agar instrumen biaya tidak secara signifikan mempengaruhi besar kecilnya pendapatan yang akan diakui.

Berdasarkan PSAK 72 pada paragraf 47 menjelaskan bahwa dalam menentukan harga transaksi entitas harus mempertimbangkan syarat – syarat kontrak dan juga praktik umum entitas. Harga transaksi didefinisikan sebagai jumlah imbalan yang diperkirakan menjadi hak entitas dalam pertukaran untuk mengalihkan jasa manajemen konstruksi kepada pelanggan. Harga transaksi pada paket pekerjaan manajemen konstruksi gedung utama Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang ditentukan dari nilai kontrak yaitu senilai Rp 3.011.040.000

Mengalokasikan Harga Transaksi Terhadap Kewajiban Pelaksanaan

Berdasarkan paragraf 73 dalam PSAK 72, entitas dalam mengalokasikan harga transaksi terhadap setiap kewajiban pelaksanaan dalam jumlah yang menggambarkan jumlah imbalan yang, diperkirakan menjadi hak entitas dalam pertukaran untuk mengalihkan barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan. Selain itu pada paragraf 74 dijelaskan bahwa entitas mengalokasikan harga transaksi terhadap kewajiban pelaksanaan yang diidentifikasi dalam kontrak dengan dasar harga jual berdiri sendiri relatif (*relative stand – alone selling price*). PT X seharusnya dapat melakukan alokasi harga transaksi terhadap kewajiban pelaksanaan dengan andal dan akurat agar tidak berpengaruh pada besarnya pendapatan yang diakui. PT X perlu mempertimbangan beberapa hal dalam melakukan alokasi harga transaksi terhadap kewajiban pelaksanaan seperti : (1) keuntungan dan biaya, (2) penilaian nilai riil dari komponen biaya yang direncanakan, (3) pertimbangan risiko, serta pertimbangan lainnya yang relevan pada proses alokasi harga transaksi.

Mengakui Pendapatan Setelah Kewajiban Pelaksanaan Terpenuhi

PSAK 72 mendeskripsikan bahwa entitas dalam mengakui pendapatan ketika salah satu pihak dalam kontrak telah melaksanakan atau memenuhi kewajiban pelaksanaan dengan mengalihkan barang atau jasa yang dijanjikan pada pelanggan. Dalam hal ini PT X mengakui pendapatan ketika telah menyelesaikan atau mengalihkan jasa manajemen konstruksi Green Building Gedung Utama Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

PT X sebagai pelaksana pekerjaan dalam mengakui pendapatan pada pekerjaan Manajemen Konstruksi Green Building Kejaksaan Agung Republik Indonesia, PT X menggunakan metode kontrak selesai dalam mengakui pendapatan serta ukuran *output* untuk mengukur kemajuan persentase pekerjaan menuju penyelesaian. Berdasarkan kontrak yang dijalankan, PT X seharusnya menggunakan metode persentase penyelesaian dalam mengakui pendapatan dan biaya serta menggunakan ukuran *input* dalam mengukur kemajuan pekerjaan menuju penyelesaian. Dengan menggunakan metode persentase penyelesaian dan ukuran *input* dalam mengakui pendapatan maka PT X akan mengetahui laba atau rugi bruto setiap periode berjalan agar menjadi bahan evaluasi serta bahan pengambilan keputusan akuntansi pada periode

selanjutnya.

Pengungkapan Pendapatan dan Biaya setelah penyajian

Dalam mengungkap pendapatan dan biaya pada proyek ini PT X secara eksplisit mengungkap pendapatan sesuai dengan PSAK 72 dimana pendapatan diungkap sesuai dengan status nya apakah tergolong sebagai aset kontrak atau kewajiban kontrak. Pada proyek ini pendapatan diungkap sebagai aset kontrak hal ini dikarenakan pelanggan telah melunasi kewajiban atas penyelesaian pekerjaan yang dilaksanakan oleh PT X secara berkala.

Berdasarkan hasil analisis diatas diketahui bahwa dalam mengakui dan mengukur kemajuan pekerjaan serta pendapatan pada PT X masih terdapat beberapa kekeliruan oleh karena itu pengakuan pendapatan dan biaya apabila masa pekerjaan lebih dari 1 tahun harus menggunakan metode persentase penyelesaian sebagai berikut :

Tabel 5. Informasi Pengukuran Pendapatan Berdasarkan PSAK 72

Tahun	Realisasi Biaya	Taksiran biaya penyelesaian	Progres Pekerjaan	Termin difakturkan	Penerimaan Termin
2021	669.120.000	2.220.994.475	26%	769.488.000	769.499.730
2022	1.321.512.000	943.922.652	63%	2.275.042.680	2.275.008.000
2023	1.020.408.000	-	100%	301.155.000	301.104.000
	3.011.040.000	3.011.040.000		3.345.651.000	3.345.651.000

Sumber : PT X diolah peneliti 2023

Berdasarkan tabel 4.5 diatas dalam mengukur pendapatan PT X menggunakan ukuran *input* dalam mengukur porsi pendapatan yang harus diakui melalui persentase pekerjaan menuju penyelesaian. Adapun rumus dalam menghitung persentase penyelesaian adalah sebagai berikut :

$$\text{Persentase Penyelesaian} : \frac{\text{Realisasi biaya hingga tahun ini}}{\text{Total taksiran biaya penyelesaian}} \times 100\%$$

$$\text{Pendapatan diakui} : \text{Persentase Penyelesaian} \times \text{Nilai Kontrak} = \text{Pendapatan diakui}$$

Berdasarkan rumus di atas maka jurnal yang harus dicatat oleh PT X adalah sebagai berikut :

1. Penyajian Jurnal 2021

Pada tahun 2021 pengakuan pendapatan diakui sebesar progres pekerjaan yaitu 23% berikut merupakan pengukuran dan penyajian jurnal pada tahun 2021 :

a) Pengeluaran Biaya

Pekerjaan dalam progres	Rp 669.120.000
Kas besar kantor pusat	Rp 669.120.000

b) Penagihan Termin

Piutang Gedung / Prasarana Industri Lancar	Rp 769.499.730
Tagihan Bruto Gedung / Prasarana	Rp 769.499.730

c) Pembayaran Termin

PT Bank Mandiri	Rp 657.922.269
Biaya Pajak Pertambahan Nilai	Rp 84.644.970
Biaya Pajak PPh pasal 4 Ayat 2 Final	Rp 26.932.491
Piutang Gedung / Prasarana Industri Lancar	Rp 769.499.730

d) Pengakuan Laba

Pend Gedung / Prasarana Industri Lancar	Rp 769.499.7300
Kas besar kantor Pusat	Rp 669.120.000
Laba Bruto Periode Berjalan	Rp 100.379.730

2. Penyajian jurnal tahun 2022

Pada tahun 2022 pengakuan pendapatan diakui sebesar progres pekerjaan yaitu 68% berikut merupakan penyajian jurnal pada tahun 2022 :

a) Pengeluaran Biaya

Pekerjaan dalam progres	Rp 1.990.632.000
Kas besar kantor pusat	Rp 1.990.632.000

b) Penagihan Termin

Piutang Gedung / Prasarana Industri Lancar	Rp 2.275.042.680
Tagihan Bruto Gedung / Prasarana	Rp 2.275.042.680

c) Pembayaran Termin

PT Bank Mandiri	Rp 1.945.161.491
-----------------	------------------

Biaya Pajak Pertambahan Nilai	Rp	250.254.695
Biaya Pajak PPh pasal 4 Ayat 2 Final	Rp	79.626.494
Piutang Gedung / Prasarana Industri Lancar	Rp	2.275.042.680
d) Pengakuan Laba		
Pend Gedung / Prasarana Industri Lancar	Rp	2.275.042.680
Kas besar kantor Pusat	Rp	1.990.632.000
Laba Bruto Periode Berjalan	Rp	284.410.680

3. Penyajian jurnal tahun 2023

Pada tahun 2023 pengakuan pendapatan diakui sebesar progres pekerjaan yaitu 100% berikut merupakan penyajian jurnal pada tahun 2023 :

a) Pengeluaran Biaya

Pekerjaan dalam progres	Rp	3.011.040.000
Kas besar kantor pusat	Rp	3.011.040.000

b) Penagihan Termin

Piutang Gedung / Prasarana Industri Lancar	Rp	3.345.651.000
Tagihan Bruto Gedung / Prasarana	Rp	3.345.651.000

c) Pembayaran Termin

PT Bank Mandiri	Rp	2.860.531.605
Biaya Pajak Pertambahan Nilai	Rp	368.021.610
Biaya Pajak PPh pasal 4 Ayat 2 Final	Rp	117.097.785
Piutang Gedung / Prasarana Industri Lancar	Rp	3.345.651.000

d) Pengakuan Laba

Pend Gedung / Prasarana Industri Lancar	Rp	3.345.561.000
Kas besar kantor pusat	Rp	3.011.040.000
Laba bruto periode berjalan	Rp	334.611.000

Berdasarkan pencatatan jurnal diatas maka pengungkapan pengakuan pendapatan dan biaya pada laporan Laba / Rugi dan laporan Neraca dengan metode persentase penyelesaian adalah sebagai berikut :

Tabel 6. Laporan Laba Rugi Proyek Berdasarkan PSAK PSAK 72

Lab a Rugi	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
Pendapatan Pusat Gedung dan Prasana	Rp 769.499.730	Rp 2.275.042.680	Rp 3.345.651.000
Kas besar kantor pusat	Rp 669.120.000	Rp 1.990.632.000	Rp 3.011.040.000
Lab a Bruto	Rp 100.379.730	Rp 284.410.680	Rp 334.611.000

Sumber : PT X diolah peneliti 2023

Tabel 7. Laporan Neraca Proyek Berdasarkan PSAK 72

Neraca	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
Aset			
Kas / Kas di Bank	Rp 657.922.269	Rp 1.945.161.491	Rp 2.860.531.605
Kas besar kantor pusat	(Rp 669.120.000)	(Rp1.990.632.000)	(Rp 3.011.040.000)
Total Aset	Rp 11.197.731	Rp 45.470.509	Rp 150.508.395
Kewajiban			
PPN Keluaran	Rp 84.644.9700	Rp 250.254.695	Rp 368.021.610
PPH Pasal 4 Ayat 2 Final	Rp 26.932.491	Rp 79.626.494	Rp 117.097.785
Total Kewajiban	Rp 111.577.461	Rp 329.881.189	Rp 485.119.395
Modal			
Lab a Rugi Periode Berjalan	(Rp 100.379.730)	(Rp 284.410.680)	(Rp 334.611.000)
Total Kewajiban dan Modal	Rp 11.197.731	Rp 45.470.509	Rp 150.508.395

Sumber : PT X diolah peneliti 2023

Berdasarkan tabel 7 diatas PT X mengungkapkan pengakuan pendapatan dan biaya dengan metode persentase penyelesaian dimana pada setiap akhir tahun periode berjalan PT X dapat mengetahui Laba Kotor yang dihasilkan dari penerimaan termin berdasarkan persentase penyelesaian. PT X

pada tahun 2021 mengakui laba sebesar Rp 100.379.730, tahun 2022 sebesar Rp 284.410.680,- dan pada akhir pekerjaan laba yang diakui sebesar Rp 334.611.000,-.

Pada Laporan Neraca Total Aset, kewajiban dan modal pada tahun 2021 sebesar Rp 11.197.731, tahun 2022 sebesar Rp 45.470.509, dan pada akhir periode kontrak total aset kewajiban dan modal sebesar Rp 150.508.395,-

KESIMPULAN DAN SARAN

Implementasi pengakuan pendapatan dan biaya Pada PT X berdasarkan (PSAK) 72, yang terdiri dari 5 tahapan, diawali dengan mengidentifikasi kontrak dengan pelanggan, menentukan harga transaksi, mengalokasikan harga transaksi terhadap kewajiban pelaksanaan, dan pengakuan pendapatan setelah (pada saat) setelah kewajiban pelaksanaan terpenuhi.

Pada proyek Manajemen Konstruksi Green Building Gedung Utama Kejaksaan Agung Republik Indonesia, PT X sebagai pelaksana kerja perlu melakukan penyesuaian terhadap metode pengakuan pendapatan serta ukuran yang digunakan dalam mengukur kemajuan pekerjaan menuju penyelesaian. Hal ini diperlukan agar pengakuan pendapatan dengan metode persentase penyelesaian pada pekerjaan ini biasa diukur dengan akurat serta dapat menyajikan laba periode berjalan.

DAFTAR PUSTAKA

- Damayanti, E. F. (2016). Analisis Pengakuan Pendapatan Pada Perusahaan Konstruksi. *Akuisisi: Jurnal Akuntansi*, 12(1).
- Arief, S. W., Manossoh, H., & Alexander, S. W. (2017). Analisis penerapan PSAK No. 109 tentang akuntansi zakat, infaq/sedekah pada badan amil zakat nasional Kota Manado. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*12(1).
- Batubara, Z. (2017). Teknik Akuntansi Pada BAZ dan LAZ Di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Syariah*, 231.
- Brown, L. D., & Moore, M. H. (2001). The Hauser Center for Nonprofit Organizations Accountability, Strategy, and International Non-Governmental Organizations. *Working Paper No. 7. SSRN.com*.
- Halim, A. (2008). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba 4.
- Hidayat, S., Zanatun, A., & Rohaeni, N. (2018). Analisis Laporan Keuangan Berdasarkan Psak

- 109 Pada Yayasan Rumah Yatim Arrohman. *Jurnal Akuntansi*.
- Khadafi, M., Siregar, S., Harmain, H., Nurlaila, Zaki, M., & Dahrani. (2016). *Akuntansi Syariah*. Manado: Madenatera.
- Kieso. (2016). *Intermediate Accounting, Edisi 12*. Jakarta: Erlangga.
- Kieso, Weygandt, & Kimmel. (2019). *Pengantar Akuntansi 1 Berbasis IFRS*. Salemba Empat.
- Kieso, Weygandt, & Warfield. (2019). *Akuntansi Keuangan Menengah (Intermediate Accounting)* (Vol. II). Jakarta: Salemba Empat.
- Marliyati. (2015). Akuntabilitas Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat di Kota Semarang. *MIMBAR*, Vol. 31, No. 2 (Desember, 2015), 485-494.
- Mulyadi. (2012). *Akuntansi Biaya*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mulyadi. (2018). *Akuntansi Biaya* (Vol. 517). SEKOLAH TINGGI ILMU MANAJEMEN.
- Nasution. (1998). *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Tarsito.
- Pardede, P. (2019). PARADIGMA PENELITIAN. *Universitas Kristen Indonesia* , 1-9.
- Rahmawati, I. D., & P, F. A. (2015). Penerapan Akuntansi Zakat PSAK 109 Pada LAZ LMI Cabang Sidoarjo dan Baznaz Kab Sidoarjo. *Seminar Nasional dan Call For Papers Ekonomi Syariah "Indonesia Sebagai Kiblat Ekonomi Syariah"*, 94.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&d* (2 ed.). (Sutopo, Ed.) Bandung, Jawa Barat, Indonesai: Alfabeta.
- Sugiyono. (2019). *METODE PENELITIAN KUANTITATIF, KUALITATIF DAN RND*. BANDUNG: ALFABETA.
- Supami, Ati, & Defia. (2018). *Akuntansi Keuangan Dalam PERSPEKTIF IFRS Dan SAK-ETAP*. Mitra Wacana Media.
- Suwardi, N. H. (2013). *Analisis akuntabilitas publik organisasi pengelola zakat berdasarkan aspek pengendalian intern dan budaya organisasi (Studi kasus pada Organisasi Pengelola Zakat di Indonesia)*.
- Triyuwono, I. (2015). *Akuntansi Syariah; Perspektif, Metodologi, dan Teori*. Jakarta: Rajawali Pers.